

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu faktor kunci yang menyebabkan rapuhnya keberlanjutan Kampung Pelangi adalah dominasi pendekatan *top-down* dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan, di mana pemerintah daerah berperan lebih sebagai *project owner* daripada sebagai *enabler* bagi masyarakat. Sejak tahap awal, pengembangan Kampung Pelangi dirancang, ditentukan, dan dieksekusi terutama oleh pemerintah melalui regulasi, alokasi anggaran, serta intervensi fisik yang bersifat masif dan seragam. Dalam praktiknya, masyarakat lebih banyak diposisikan sebagai objek pelaksanaan program, bukan sebagai aktor utama yang dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan strategis.

Kebijakan yang diturunkan melalui berbagai regulasi dan program tematik lebih menekankan pada pencapaian hasil fisik yang cepat dan mudah terlihat, seperti pengecatan massal dan penataan visual kawasan, namun relatif kurang memperhatikan aspek *capacity building* masyarakat. Pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan lokal yang seharusnya menjadi fondasi keberlanjutan tidak dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Akibatnya, ketika dukungan pemerintah dan pihak swasta mulai berkurang, masyarakat belum memiliki kapasitas yang memadai baik dari sisi manajerial, finansial, maupun organisasi untuk melanjutkan pengelolaan destinasi secara mandiri. Seharusnya, pengembangan Kampung Pelangi sebagai desa wisata tidak berhenti pada penciptaan daya tarik visual dan penyediaan infrastruktur, tetapi diarahkan pada proses pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Masyarakat perlu dilatih dan

didampingi agar memiliki kapasitas yang kuat dalam mengelola operasional wisata, mengembangkan usaha ekonomi lokal, menjaga kualitas lingkungan fisik, serta membangun kelembagaan yang transparan dan akuntabel. Tanpa proses pemberdayaan tersebut, destinasi wisata akan sangat bergantung pada intervensi eksternal dan mudah mengalami kemunduran ketika dukungan tersebut berhenti

4.2 Saran

Pengembangan Kampung Pelangi ke depan perlu diarahkan pada penguatan keberlanjutan yang tidak hanya bertumpu pada intervensi fisik dan kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kapasitas dan kemandirian masyarakat lokal. Pemerintah Kota Semarang disarankan untuk melakukan pergeseran peran dari *project owner* menjadi *enabler*, dengan fokus pada pendampingan jangka panjang dan program *capacity building* yang berkelanjutan. Program pelatihan pengelolaan destinasi, manajemen keuangan, pemeliharaan lingkungan, serta penguatan kelembagaan masyarakat perlu dilakukan secara konsisten agar warga memiliki kemampuan untuk mengelola destinasi secara mandiri ketika dukungan eksternal berkurang. Evaluasi program kampung tematik juga sebaiknya tidak hanya menilai keberhasilan visual dan popularitas jangka pendek, tetapi menitikberatkan pada aspek keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Di sisi lain, pengelola Kampung Pelangi, khususnya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), perlu melakukan pembenahan internal agar kembali berfungsi sebagai wadah koordinasi dan penggerak masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan, pemerataan peran lintas wilayah, serta penguatan komunikasi antarwarga menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan dan

meningkatkan partisipasi masyarakat. Pengelolaan destinasi juga perlu diarahkan pada diversifikasi daya tarik wisata agar tidak semata-mata bergantung pada kekuatan visual, melainkan pada aktivitas, pengalaman, dan keterlibatan pengunjung yang lebih berkelanjutan. Upaya pemeliharaan fisik kampung, seperti perawatan cat, kebersihan lingkungan, dan fasilitas spot foto, harus dikelola secara terjadwal dan kolektif sebagai tanggung jawab bersama.

Bagi masyarakat Kampung Pelangi, penelitian ini menyarankan perlunya penguatan rasa memiliki terhadap identitas kampung sebagai aset bersama, bukan sekadar program pemerintah. Keterlibatan aktif warga dalam pengelolaan operasional sehari-hari, kegiatan gotong royong, serta pengembangan usaha ekonomi lokal menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan destinasi. Partisipasi masyarakat yang tumbuh dari kesadaran kolektif akan membuat Kampung Pelangi lebih tahan terhadap perubahan tren pariwisata dan tidak mudah mengalami kemunduran ketika momentum viralitas berakhir.

Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara komparatif pengelolaan desa wisata lain yang mampu bertahan dalam jangka panjang, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Kajian lanjutan juga dapat mengeksplorasi strategi inovasi dan pemanfaatan media digital dalam mendukung keberlanjutan desa wisata berbasis masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan dan praktik pengembangan desa wisata yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.